

# **KLIPING BERITA MEDIA MASSA**

**Selasa, 25 Juni 2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (Halaman, 15)	Selasa, 25 Juni 2019	Jakarta Butuh RDTR Zona Khusus	Untuk membantu Program Sejuta Rumah (PSR), kota padat penduduk seperti DKI Jakarta membutuhkan rencana detail tata urang (RDTR) yang dilengkapi zona khusus untuk rumah rakyat.
2	Media Indonesia (Halaman, 16)	Selasa, 25 Juni 2019	Daerah Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan	Bencana kekeringan meski rutin terjadi setiap tahun, di beberapa daerah tetap memerlukan penanganan secara serius. Pasalnya, prediksi iklim saat ini semakin sulit dipastikan.
3	Kompas (Halaman, 12)	Selasa, 25 Juni 2019	Waduk-waduk Masih Terisi	Ketersediaan air di sejumlah waduk besar di Pulau Jawa diprediksi cukup memenuhi berbagai kebutuhan hingga akhir musim kemarau. Namun, sejumlah petani telah dilanda hujan minim.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 3)	Selasa, 25 Juni 2019	PROYEK INFRASTRUKTUR: Cipali & Jejak Malaysia di Jalan Tol	Kiprah investor Malaysia di jagad jalan tol Indonesia berpeluang mengempis. Pelan tetapi pasti, investor asal Negeri Jiran itu henggang dari sejumlah ruas tol.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 25 Juni 2019	Trans-Sumatra: Tol Terpeka Rampung Agustus	Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung atau biasa disebut Tol Terpeka dijadwalkan rampung pada Agustus 2019. Jalan tol sepanjang 189 kilometer ini bakal menjadi simpul penting bagi konektivitas di Sumatra Bagian Selatan.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 25 Juni 2019	Perombakan Rest Area Tunggu Momen	PT Nusantara Infrastructure Tbk. atau META menilai pemerintah harus memperhatikan momentum-momentum tertentu apabila ingin merombak rest area.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Selasa, 25 Juni 2019	Tol Solo-Yogyakarta: Arus Distribusi Barang akan Makin Cepat	Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta dan Bawen – Yogyakarta akan membuat arus distribusi barang semakin cepat.
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Selasa, 25 Juni 2019	Bisnis Sewa Apartemen Indekos Prospektif	Permintaan kaum milenial akan properti sebenarnya cukup tinggi. Namun, golongan itu belum mau membeli rumah karena merasa belum siap dan ingin menggunakan dananya untuk keperluan lain.
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)	Selasa, 25 Juni 2019	Rencana Zonasi Diminta Beres Tahun Ini	Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta agar seluruh pemerintah provinsi bisa merampungkan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) tahun ini.

Judul	<b>Jakarta Butuh RDTR Zona Khusus</b>	Tanggal	Selasa, 25 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 15)		
Resume	Untuk membantu Program Sejuta Rumah (PSR), kota padat penduduk seperti DKI Jakarta membutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR) yang dilengkapi zona khusus untuk rumah rakyat.		

# Jakarta Butuh RDTR Zona Khusus

UNTUK membantu Program Sejuta Rumah (PSR), kota padat penduduk seperti DKI Jakarta membutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR) yang dilengkapi zona khusus untuk rumah rakyat.

“Keberadaan zona khusus rumah rakyat di dalam RDTR diyakininya lebih efektif membantu Program Sejuta Rumah (PSR), baik dari sisi permintaan atau kebutuhan masyarakat maupun penyediaan (pasokan) dari pengembang,” ujar Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, seperti dikutip *Antara* di Jakarta, Kamis (20/6).

Diakuinya, dengan zona khusus yang harga lahannya terkendali, maka pengembang rumah subsidi yang selama ini kesulitan mencari lahan terjangkau di dekat kota akan

sangat terbantu.

Namun, sukses atau tidaknya pengembangan zona khusus ini, menurut Soelaeman, sangat bergantung kepada dua syarat. Syarat pertama ialah pemerintah harus mendukung penuh pembangunan infrastruktur kawasan zona khusus rumah rakyat. Syarat kedua, pemerintah daerah harus tegas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan di zona tersebut.

“Pengawasan oleh pemerintah daerah penting sekali. Artinya, kalau di zona itu khusus rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tidak bisa dijual, misalnya, kepada pengembang rumah komersial. Harus tegas sesuai peruntukannya,” ujar Soelaeman.

Di sisi lain, pengamat properti

Ali Traghanda mengakui, tingginya harga tanah di DKI Jakarta membuat masyarakat harus mencari lokasi hunian jauh dari tempat kerja. Hal itu memicu terjadinya kemacetan yang menjadi persoalan utama di Ibu Kota negara ini.

Hunian berkonsep *transit oriented development* (TOD) atau hunian *nempel* stasiun pun belum efektif karena mahalnya harga hunian tersebut.

Untuk itu, Ali mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan harga tanah di DKI dengan cara membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar sehingga penghuni tidak terkendala dengan kenaikan harga tanah di sekitarnya yang memicu terjadinya spekulasi. (S-2)

Judul	Daerah Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan	Tanggal	Selasa, 25 Juni 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 16)		
Resume	Bencana kekeringan meski rutin terjadi setiap tahun, di beberapa daerah tetap memerlukan penanganan secara serius. Pasalnya, prediksi iklim saat ini semakin sulit dipastikan.		

# Daerah Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan

*Bencana kekeringan meski rutin terjadi setiap tahun, di beberapa daerah tetap memerlukan penanganan secara serius. Pasalnya, prediksi iklim saat ini semakin sulit dipastikan.*

LILIEK DHARMAWAN  
lilik@mediaindonesia.com

**B**ADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas, Jawa Tengah, sedang memproses penetapan siaga darurat bencana kekeringan. Sejumlah desa di sana sudah mengalami krisis air bersih. Dengan penetapan siaga darurat kekeringan, penanganan krisis air bersih bakal lebih optimal.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Banyumas, Ariono Poerwanto, mengatakan pihaknya tengah memproses status siaga darurat bencana ke bupati.

"Nantinya, Pak Bupati akan membuat surat keputusan (SK) siaga darurat kekeringan. Kami juga telah mengalokasikan anggaran untuk menyuplai kebutuhan air bersih dengan penyediaan 1.450 tangki air bersih," jelas Ariono, kemarin.

Hingga kini sudah ada 10 desa yang tersebar di 9 kecamatan meminta suplai air bersih. Sembilan kecamatan itu, yakni Sumpiuh, Rawalo, Jatilawang, Patikraja, Purwojati, Karanglewas, Kalibagor, Rawalo, dan Cilongok. "Untuk hari ini (Senin) jadwalnya menyuplai air bersih di Desa Kediri, Kecamatan



ANTARA/ALYOUSUS JAROT NUGROHO

**MENGAIRI:** Seorang petani mengairi lahan pertanian kacang miliknya dari sumur bor di Gumukrejo, Andong, Boyolali, Jawa Tengah, kemarin. Pada musim kemarau, petani memanfaatkan sumur bor untuk mengairi lahan pertanian dengan biaya Rp28 ribu-Rp70 ribu untuk membeli bahan bakar minyak diesel pompa air.

Karanglewas," ujarnya.

Adapun, kabupaten tetangga, yakni Pemkab Kebumen telah menetapkan siaga darurat kekeringan. Pemkab melalui BPBD Kebumen menyiapkan 1.450 tangki air bersih untuk menyuplai kebutuhan masyarakat selama kemarau.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kebumen Eko Widiyanto mengatakan penetapan siaga darurat kekeringan telah dilaksanakan sejak awal Juni lalu. Namun, sampai sekarang masih minim daerah yang meminta pasokan air bersih. "Tercatat baru ada sejumlah desa di Kecamatan Kutowinangun dan Pejagoan

yang mengajukan permintaan air bersih."

Kesiapsiagaan menghadapi kemarau dan potensi kekeringan tahun ini juga disampaikan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, kemarin. Dia mengimbau masyarakat tidak terlalu khawatir dalam menghadapi kekeringan.

"Pemda sudah menyiapkan antipasi termasuk anggaran untuk kekeringan," kata Sultan di Kantor Gubernur DI Yogyakarta. Setiap kabupaten/kota, kata Sultan, pasti memiliki pos anggaran untuk darurat kekeringan. Begitu kekeringan terjadi, pos anggaran tersebut bisa langsung digunakan.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana juga mengatakan wilayah rawan di DIY, yakni yang ada di daerah perbukitan, seperti di Imogiri, Bantul, Kabupaten Gunungkidul sisi selatan, dan di Kulonprogo, seperti Kokap dan Girimulyo. Menurut dia, kabupaten dan kota sudah mempersiapkan diri termasuk cara penanganan kekeringan yang berpedoman pada kejadian tahun sebelumnya.

## Tanam palawija

Sebagai upaya antisipasi kondisi kekeringan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, Dinas Pertanian Kabupaten

Manggarai Barat meminta para petani di sana untuk menanam palawija. Beberapa tanaman yang dianjurkan, yakni terung atau semangka yang diharapkan dapat menjadi pemasukan tambahan bagi petani.

"Dinas Pertanian telah menerapkan pola tanam palawija di lebih 50 ha milik petani," ujar Kepala Dinas Pertanian Anggalinus Gapul.

Ditambahkan, para petugas penyuluh pertanian tetap membantu proses, mulai tanam hingga pengawasan hama agar mampu menghasilkan produksi palawija yang melimpah. (AT/AD/JL/YK/RK/OL/RF/N-1)

Judul	<b>Waduk-waduk Masih Terisi</b>	Tanggal	Selasa, 25 Juni 2019
Media	Kompas (Halaman, 12)		
Resume	Ketersediaan air di sejumlah waduk besar di Pulau Jawa diprediksi cukup memenuhi berbagai kebutuhan hingga akhir musim kemarau. Namun, sejumlah petani telah dilanda hujan minim.		

# Waduk-waduk Masih Terisi

Ketersediaan air di sejumlah waduk besar di Pulau Jawa diprediksi cukup memenuhi berbagai kebutuhan hingga akhir musim kemarau. Namun, sejumlah petani telah dilanda hujan minim.

**JAKARTA, KOMPAS** — Sejumlah daerah di Pulau Jawa menerima peringatan prediksi kekeringan ekstrem dengan indikator 31-60 hari tanpa hujan terhitung sejak pekan kedua Juni 2019. Di sejumlah daerah, petani cemas gagal tanam dan gagal panen meskipun berada pada jangkauan irigasi waduk-waduk besar.

Hingga kemarin, pengelola waduk-waduk besar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih optimistis suplai air mencukupi. "Diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan industri, air baku minum, dan irigasi hingga akhir musim kemarau atau Desember 2019," kata Direktur Operasi Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Antonius Aris di Purwokarta, Senin (24/6/2019).

Rincian kebutuhan air dari Waduk Jatiluhur hingga akhir tahun meliputi 3.053 juta meter kubik irigasi, 367 juta meter kubik industri, dan air baku 729 juta meter kubik. Cakupan waduk tersebar di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Di Jawa Tengah, meski tinggi muka air menurun karena kemarau, Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonorejo masih memiliki simpanan air sekitar 200 juta meter kubik. Saat ini, Gajah Mungkur masih terus memasok kebutuhan air untuk irigasi di wilayah Solo Raya.

"Sekarang yang kami lepas dari Wonorejo 25 meter kubik per detik. Itu untuk memenuhi kebutuhan irigasi Colo Barat dan Colo Timur," kata Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air III Perum Jasa Tirta I Wilayah Sungai Bengawan Solo Viari Djadjasaga, pengelola Bendungan Serbaguna Wonorejo atau Waduk Gajah Mungkur.

Dengan simpanan volume air itu, pelepasan air irigasi Colo Barat dan Colo Timur dapat dilakukan hingga Oktober atau akhir kemarau. Cakupan daerah irigasi pertanian yang dapat terasir seluas 24.000 hektar di Solo Raya, Jawa Tengah, antara lain Wonorejo, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten.

"Sampai akhir Oktober, kami



KOMPAS/HAJIR FERDINUS

**Warga** berjalan di samping Embung Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang airnya mulai menyusut, Senin (24/6/2019). Saat penuh, volume air di Embung Nglanggeran bisa mencapai 12.000 meter kubik. Namun, memasuki musim kemarau, volumenya terus berkurang. Hingga saat ini, volume air embung sekitar 8.000 meter kubik.

akan tetap mengalirkan sesuai kebutuhan petani," ujarnya.

Madyo (67), petani Desa Kepuh, Kabupaten Sukoharjo, mengatakan masih dapat pasokan air irigasi cukup sehingga tetap menanam padi di sawah seluas 1.000 meter persegi. "Ini masa tanam padi kedua. Setelah panen, saya tidak berani tanam padi lagi. Air irigasi pasti tidak cukup," katanya.

Di Jatim, fungsi Waduk Wonorejo seluas 3.85 kilometer persegi di Desa Mulyosari, Kabupaten Tulungagung, masih optimal. Waduk dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta I yang beroperasi sejak 2001 itu sebagai pengendali banjir, penyuplai kebutuhan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air.

"Ketersediaan air di Waduk Wonorejo masih bisa memenu-

hi kebutuhan irigasi dan pemanfaatan lain," kata pengatur Waduk Wonorejo, Abdul Basid.

## Berhemat

Mengantisipasi risiko kemarau, pengelola waduk mulai berhemat, seperti di Waduk Cacaban, Tegal, Jateng. Volume air diperkirakan hanya cukup untuk irigasi hingga Agustus sehingga debit air yang dialirkan dibatasi 3.500 liter per detik.

"Air waduk akan berhenti dialirkan ketika volume air di waduk kurang dari 5 juta meter kubik," kata pengelola Waduk Cacaban, Edi Kusworo. Waduk ini mengairi pertanian seluas 17.481 hektar.

Dalam skala berbeda, para petani di Desa Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul, DIY, juga bersiap menghadapi kekeringan.

Ketinggian muka air Embung Nglanggeran berkurang. Padahal, selain untuk wisata, embung itu juga mengairi kebun buah yang dikelola kelompok tani.

"Dalam kondisi penuh, volume air di Embung Nglanggeran mencapai 12.000 meter kubik tetapi tinggal sekitar 8.000 meter kubik," kata Ketua Kelompok Tani Kebun Buah Kencono Mukti Sutardi. Ada 1.800 pohon durian dan 200 pohon kelengkeng bergantung pengairan dari embung itu.

Masih di Gunung Kidul, para petani pengakses Embung Barata Sriten bersiap menghadapi kemarau. Lusa lahan pertanian 4 hektar. "Penggunaan air embung kami batasi," kata Ketua Kelompok Tani Ngudi Tani Sriten Radata.

Di Kabupaten Madiun, Jatim, perhitungan ketersediaan air juga masih dilakukan meskipun kondisi air di empat waduk (Waduk Notopuro, Dawuh-an, Saradan, dan Kedungbrubus) dinilai aman.

"Para petugas masih menganalisis ketahanannya," kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Madiun Maskur Yatim.

Di Karawang, meskipun suplai Waduk Jatiluhur masih bagus, petani di Kecamatan Majalaya, Saepul (36), mengeluhkan debit air irigasi yang minim sehingga memundak mengolah sawah garapannya. Tanggal air irigasi di desanya pun sempat rusak.

OMEL/RWN/XTI/BRO/NIK/HRS/IKI

## KEKERINGAN

### Getir Petani Kala Krisis Air Mendera

Mawardi (59), petani di Desa Kademangaran, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah saat sawah seluas 1 hektar miliknya terancam puso. Kekeringan yang melanda sejak seminggu setelah padi ditanam atau sekitar awal Mei lalu menjadi penyebabnya. Padahal, ia sudah berupaya mempertahankan tanaman padinya dengan menggali sumur bor dan mengalirkan air menggunakan mesin pompa.

"Sudah habis jutaan rupiah untuk gali sumur dan beli solar mesin pompa, tetapi air yang keluar tidak cukup untuk mengairi sawah. Daripada saya teruskan, lebih baik saya biarkan mati saja padinya," ucap Mawardi.

Mawardi sebenarnya sudah mengurangi luasan lahan tanamnya. Sebenarnya, ia memiliki 2 hektar lahan tanam. Sembari mengurangi lahan tanam, Mawardi memperkirakan masih ada hujan yang turun membantu pengairan. Sayangnya, perkiraan Mawardi meleset.

"Kondisinya lebih parah dari tahun lalu. Tahun lalu masih ada hujan sampai Juli. Tahun ini, Mei saja sudah tidak ada hujan sama sekali," imbuh Mawardi.

Untuk 1 hektar lahan tanam padi tadah hujan miliknya itu, total kerugian yang dialami Mawardi mencapai lebih dari 10 juta, di antaranya Rp 7 juta untuk membuat sumur bor sedalam 20 meter dan biaya pengoperasian mesin pompa air sekitar Rp 280.000 per hari.

Supiah (50), petani jagung di Desa Kademangaran, juga terancam merugi. Pada musim tanam ini Supiah menanam jagung di lahan seluas 2 hektar.

Dalam kondisi normal, Supiah bisa membawa hasil hingga Rp 45 juta. Adapun kemarau ini membuat keuntungannya berkurang hingga 50 persen. Kekeringan membuat kualitas jagung yang dihasilkan menurun. Jika sebelumnya dua tongkol jagung mencapai berat 1 kilogram, kini butuh 4-5 tongkol untuk 1 kilogram jagung. "Hasil di musim tanam ini paling hanya bisa menghasilkan Rp 20 jutaan. Itu juga kalau masih ada yang mau beli," ujar Supiah.

Lahan pertanian di Kecamatan Dukuhuri tidak terjangkau Waduk Cacaban di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Meski air di waduk itu juga menyusut dari 49 juta meter kubik menjadi 32 juta meter kubik saat kemarau kali ini, sebagian airnya masih bisa mengairi lahan pertanian seluas 17.481 hektar di Kecamatan Kedungbanteng, Tarub, Panglah, Adiwerna, dan Kramat.

Sementara itu, kekeringan juga mengancam lahan persawahan seluas 2.656 hektar di 12 kecamatan di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk menekan dampak kekeringan, Dinas Pertanian Kabupaten Subang mengupayakan pompanisasi di daerah-daerah yang memiliki sumber air dari sungai. Hingga saat ini, Dinas Pertanian Subang telah menyalurkan pompa sebanyak 20 unit yang tersebar di Kecamatan Compreng, Cipunagara, Pauran, Cikaum, Patokbeusi, dan Binong.

Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sejumlah kecamatan rawan kekeringan, antara lain Kecamatan Tegalwaru, Pangkalan, Pakisjaya, Batujaya, Cibuya, dan Cilamaya Wetan.

Kekeringan juga melanda sekitar 1.800 hektar sawah di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. Salah satunya disebabkan kerusakan pada sebagian saluran irigasi dari Bendungan Cikocang.

"Saluran pembuangannya bermasalah. Air tak bisa naik dari bendungan itu ke saluran irigasi. Gagal panen sudah terjadi. Saya tak tahu luasnya, tetapi masih sedikit," kata Kepala Desa Katapang di Kecamatan Wanasalam Emed Kurniawan. Petani pun berharap saluran itu diperbaiki.

(XTI/MEL/BAY)

Judul	<b>PROYEK INFRASTRUKTUR: Cipali &amp; Jejak Malaysia di Jalan Tol</b>	Tanggal	Selasa, 25 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 3)		
Resume	Kiprah investor Malaysia di jagad jalan tol Indonesia berpeluang mengempis. Pelan tetapi pasti, investor asal Negeri Jiran itu henggang dari sejumlah ruas tol.		

► PROYEK INFRASTRUKTUR

# Cipali & Jejak Malaysia di Jalan Tol

Bisnis, JAKARTA – Kiprah investor Malaysia di jagad jalan tol Indonesia berpeluang mengempis. Pelan tetapi pasti, investor asal Negeri Jiran itu henggang dari sejumlah ruas tol.

Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

**M**emang masih ada yang bercokol tetapi hanya mengempit saham minoritas. Jejak langka pemodal Malaysia bakal benar-benar terkikis bila UEM Group Berhad melakukan divestasi saham di PT Lintas Marga Sedaya (LMS), operator jalan tol Cikopo-Palimanan. UEM dikabarkan berniat mengurangi sahamnya di LMS, seperti dilansir media berbasis di Singapura, DealStreet Asia pekan lalu.

Dalam catatan *Bisnis*, UEM menjadi satu-satunya investor asing yang masih memiliki saham mayoritas di badan usaha jalan tol (BUJT). UEM lewat Plus Expressway International Bhd masih memegang 55% saham LMS.

UEM merambah belantika jalan tol di Indonesia pada 2007 saat menekan perjanjian awal konsesi jalan tol Cikampek-Palimanan. Perusahaan ruas yang kini bernama Cikopo-Palimanan itu diteken pada Oktober 2011. Selang empat tahun, jalan tol sepanjang 116 kilometer itu mulai beroperasi.

Selain Cikopo-Palimanan, UEM sempat berkongsi dengan Grup Bakrie di ruas Cimanggis-Cibitung pada 2007. Konsorsium bernama Plus Bakrie Global saat itu memenangkan lelang perusahaan jalan tol Cimanggis-Cibitung. Plus melepas kepemilikan sahamnya di PT Cimanggis Cibitung Tollways ke Bakrie and Brother (BNBR) pada 2010. Pada 5 tahun kemudian, giliran Bakrie yang melego sahamnya ke PT Waskita

Toll Road, anak usaha PT Waskita Karya Tbk. Walhasil, UEM saat ini hanya memiliki satu portofolio, yaitu Cikopo-Palimanan. UEM sempat mengikuti lelang perusahaan sejumlah ruas, antara lain Pandaan-Malang tetapi tak membuahkan hasil. Di Malaysia, UEM merupakan pemegang konsesi jalan tol terbesar. Hampir 1.200 kilometer dioperasikan UEM lewat Plus Expressway Berhad.

Kabar yang menyebutkan UEM bakal melepas sahamnya di LMS sejauh ini belum terbukti. Dalam balasan surat elektronik kepada *Bisnis*, Senin (24/6), UEM menolak berkomentar ihwal rencana divestasi saham LMS. Balasan surel dikirim oleh Aishah Nor dari Group Communications & Yayasan UEM, UEM Group.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit belum memberikan tanggapan atas pertanyaan *Bisnis* ihwal kabar divestasi UEM di LMS.

Sejak 2 tahun lalu, UEM punya mitra baru di LMS, yakni PT Astra International Tbk yang lewat anak usahanya menacplok 45% saham LMS dari dua pemegang saham senilai Rp5 triliun. Astra Infra juga enggan berkomentar. CEO Toll Road Business Group Astra Infra Krist Ade Sudiyo mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terkait kabar divestasi UEM di LMS. "Saya belum bisa berkomentar terkait hal tersebut," ujarnya kepada *Bisnis*.

Astra Infra dalam 2 tahun terakhir menjadi entitas



swasta paling getol berekspansi di jalan tol lewat aksi akuisisi. Perseroan merogoh kocek Rp5 triliun untuk mengambil alih 45% saham PT Bhaskara Utama

Sedaya (BUS) dari dua pemegang saham, yaitu PT Surya Semesta Internusa Tbk. dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Akhir Mei 2019, Astra Infra juga membeli 44,5% saham PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) dari dua pemegang saham, PT Moeladi dan PT Wijaya Karya Tbk senilai Rp1,7 triliun. Sebelumnya, Group CEO - ASTRA Infra Djap Tet Fa mengatakan, pihaknya masih membuka peluang menambah portofolio di jalan tol yang sudah beroperasi.

Saat ini Astra Infra sudah mengoleksi lima ruas tol yang sudah beroperasi, yaitu Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, Semarang-Solo, Jombang-Mojokerto, dan Surabaya-Mojokerto. Tet Fa menuturkan, perseroan melirik ruas-ruas strategis yang ada di koridor Trans-Jawa.

Andai UEM jadi henggang, kiprahnya masih lebih baik dibandingkan dengan para kompatriot sesama investor Malaysia. Pemodal lain dari Negeri Jiran, MTD Capital pernah memegang saham PT MTD CTP Expressways sebelum dijual ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Waskita Toll Road pada 2015 dan 2017. CTP Expressways merupakan pemegang konsesi jalan tol Cibitung-Cilincing.

Berdasarkan data yang dihimpun *Bisnis*, selepas henggangnya MTD Capital, masih ada investor Malaysia

yang mengadu untung di proyek jalan tol, yaitu CMS Works International Limited, tergabung dalam konglomerat Cahya Mata Serawak (CMS). CMS masih mengempit 21,01% saham PT Jasamarga Cengkareng Kunciran.

Di lain pihak CEO PINA Ekoputro Adijayanto menilai bahwa animo investor asing terhadap proyek-proyek jalan tol masih tinggi.

Dia pernah menyebut China Communications Construction Company Ltd (CCCC) bakal mengambil alih saham di BUJT sekaligus bertindak sebagai kontraktor EPC (*Engineering, Procurement and Construction*).

Menurut Eko, CCCC berminat untuk berpartisipasi di beberapa proyek jalan tol sekaligus (*bundling*), baik yang sudah beroperasi maupun proyek dalam konstruksi. "Targetnya semester kedua ini mereka masuk ya, setelah proses *due diligence* [uji tuntas]. Mereka senang untuk masuk *bundling* karena pekerjaan [konstruksi] akan ada terus menerus," jelasnya.

Berdasarkan data BPJT, saat ini ada 56 jalan tol yang beroperasi dengan panjang 1.744 kilometer. Selain itu, dalam periode Juni-Desember 2019, ada 19 ruas jalan tol sepanjang 595,69 kilometer yang dijadwalkan beroperasi. Dengan kata lain, portofolio jalan tol akan semakin banyak. Jadi, saat ada pemodal hendak pergi, sesungguhnya ada pemodal lain yang sedang siaga mengincarnya. ■

Judul	Trans-Sumatra: Tol Terpeka Rampung Agustus	Tanggal	Selasa, 25 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung atau biasa disebut Tol Terpeka dijadwalkan rampung pada Agustus 2019. Jalan tol sepanjang 189 kilometer ini bakal menjadi simpul penting bagi konektivitas di Sumatra Bagian Selatan.		

► TRANS-SUMATRA

# Tol Terpeka Rampung Agustus

Bisnis, JAKARTA — Pembangunan jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung atau biasa disebut Tol Terpeka dijadwalkan rampung pada Agustus 2019. Jalan tol sepanjang 189 kilometer ini bakal menjadi simpul penting bagi konektivitas di Sumatra Bagian Selatan.

► Jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang juga menyediakan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau *rest area* di enam titik.

► Ruas tol Pematang Panggang—Kayu Agung dijadwalkan rampung pada Agustus 2019 atau sebulan setelah ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang.

Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

Jalan tol Terpeka terdiri dari ruas Terbanggi Besar—Pematang Panggang (TBPP) dan Pematang Panggang Kayu Agung (PPKA). Pemimpin Proyek Tol TBPP Bambang Eko mengatakan hingga saat ini progres konstruksi ruas Terbanggi Besar—Pematang Panggang telah mencapai 92,7%.

Dia menerangkan, kontraktor masih menyelesaikan sejumlah pekerjaan tersisa, antara lain timbunan tanah pada jalan layang (*overpass*) di STA 0 + 150. Selain itu juga sejumlah pekerjaan untuk operasional gerbang tol.

"Kami targetkan pekerjaan konstruksi selesai 31 Juli 2019," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (24/6).

Sebagaimana diketahui, jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang dibangun sejak 2016 dan memiliki tiga pintu tol. Ketiga pintu tol itu yakni Gerbang Tol (GT) Simpang Pematang, GT Menggala, GT Gunung Batin.

Di samping itu, jalan tol Terbanggi Besar—Pematang Panggang juga menyediakan tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau *rest area* di enam titik. Keenam titik itu masing-masing di KM 162, KM 171, KM 207, KM 218, KM 233, dan KM 273.

## RUAS KAYU AGUNG

Sementara itu, ruas tol Pematang Panggang—Kayu Agung dijadwalkan rampung pada Agustus 2019 atau sebulan setelah ruas Terbanggi Besar—Pematang Panggang.

Pimpinan Proyek Tol Pematang Panggang—Kayuagung, Fahrudin Haryanto mengatakan progres pekerjaan konstruksi kini telah mencapai 96,34%.

Dia menerangkan, pihaknya masih menyelesaikan sejumlah pekerjaan tersisa seperti pengaspalan, perambuan, dan pembangunan TIP. "Kami rencanakan selesai di bulan Agustus 2019," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (24/6).

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pembangunan jalan tol Terpeka menelan biaya investasi Rp21,95 triliun.

Biaya pembangunan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero), dukungan konstruksi, dan pinjaman sindikasi perbankan.

Secara khusus, dukungan konstruksi yang diberikan untuk jalan tol Terpeka mencapai 80 kilometer atau setara Rp8,37 triliun. Sementara itu, jumlah

pinjaman yang diperoleh untuk pembangunan ruas tol ini sebanyak Rp9,16 triliun. Pinjaman dikucurkan oleh Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Setelah beroperasi, jalan tol Terpeka akan melengkapi jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar (Bakter) yang sudah beroperasi sejak Maret 2019.

Alhasil, jalan tol Terpeka dan jalan tol Bakter bakal tersambung dan menjadi simpul penting bagi konektivitas di Lampung—Sumatra Selatan. Jalan tol diestimasi memangkas waktu tempuh menjadi tinggal 5—6 jam. 📄

Judul	<b>Perombakan Rest Area Tunggu Momen</b>	Tanggal	Selasa, 25 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PT Nusantara Infrastructure Tbk. atau META menilai pemerintah harus memperhatikan momentum-momentum tertentu apabila ingin merombak rest area.		

## Perombakan Rest Area Tunggu Momen

Bisnis, JAKARTA — PT Nusantara Infrastructure Tbk. atau META menilai pemerintah harus memperhatikan momentum-momentum tertentu apabila ingin merombak rest area.

Deden Rochmawaty, General Manager Corporate Affairs META, mengatakan bahwa untuk merombak tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area yang berada di jalan tol harus memperhatikan momentum terjadinya penumpukan.

“Tergantung ketersediaan lahan apabila ingin merubah tata letak rest area. Namun demikian, yang perlu dipertimbangkan adalah momentum terjadinya penumpukan biasanya terjadi hanya di waktu-waktu tertentu, khususnya liburan Lebaran,” ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Deden menambahkan, pada kasus liburan di luar Lebaran juga terjadi kepadatan, tetapi tidak sampai terjadi penumpukan sehingga perlu diperhatikan lagi apakah efisien dilakukan perombakan.

Hingga saat ini, META memiliki tiga konsesi jalan tol yaitu Pondok Ranji—Pondok Aren, Tallo—Bandara Hasanuddin, dan Pelabuhan Soekarno Hatta—Pettarani. Sepanjang 2018, ruas Pondok Ranji—Pondok Aren masih menjadi penyumbang pendapatan di sektor jalan tol, yakni sebesar Rp211,61 miliar.

Di samping tiga ruas dengan kepemilikan mayoritas, META juga telah menambah kepemilikan saham di PT Jakarta Lingkar Barat satu (JLB) menjadi 35%.

JLB merupakan pemegang konsesi ruas Kebon Jeruk—

Penjaringan yang merupakan bagian dari jalan tol lingkaran luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan melihat dari arus mudik dan arus balik tahun ini, ke depan pihaknya akan membangun tempat istirahat dengan dua kondisi.

“Orang kita ini kan malas, bukannya apa mungkin sudah capai jadi misalnya mau ke toilet, turun mobil maunya depannya toilet. Malas jalan, itu akan coba kita evaluasi misalnya parkirnya agak jauh seperti di *supermarket*,” ujarnya.

Selain itu, Basuki menambahkan ke depan pihaknya juga akan mengevaluasi letak tempat istirahat agar tidak persis di pinggir jalan tol agar tidak menghambat kendaraan yang melintas.

Sebagai percontohan adalah tempat istirahat yang terletak di Ungaran, Jawa Tengah.

Sebagai informasi, sepanjang mudik lebaran lalu Kementerian PUPR melengkapi infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional dengan berbagai fasilitas untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2019.

Salah satunya adalah rest area. Kementerian PUPR telah menyiapkan 85 rest area di sepanjang ruas Tol Trans-Jawa yang terletak setiap 20 kilometer.

Sementara itu, untuk Tol Trans-Sumatra terdapat 15 rest area di Medan, 7 rest area di Bakauheni—Terbanggi Besar, dan 7 rest area Pematang Panggang—Kayu Agung. *(Krisia P. Kinanti)*

Judul	<b>Tol Solo-Yogyakarta: Arus Distribusi Barang akan Makin Cepat</b>	Tanggal	Selasa, 25 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta dan Bawen – Yogyakarta akan membuat arus distribusi barang semakin cepat.		

► **TOL SOLO-YOGYAKARTA**

## Arus Distribusi Barang akan Makin Cepat

Bisnis, SEMARANG — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta dan Bawen – Yogyakarta akan membuat arus distribusi barang semakin cepat.

Wakil Ketua DPD Aprindo Jawa Tengah & DIY Bambang Widjanarko, mengungkapkan pembangunan kedua jalan tol tersebut akan sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha truk.

“Karena sudah pasti tol akan mempercepat arus distribusi barang,” kata Bambang kepada *Bisnis*, Senin (24/6).

Dia menjelaskan, pembangunan jalan tol sebaiknya jangan sampai terlambat, karena akan sulit bagi pemerintah untuk mengatasi kemacetan dibandingkan dengan mencegah kemacetan yang akan terjadi akibat terlambat membangun infrastruktur.

Contoh pembangunan infrastruktur jalan tol yang terlambat, dia menilai adalah jalan tol melayang atau *elevated* pada ruas Jakarta – Cikampek. Kondisi tersebut, ujarnya, membuat kemacetan yang terjadi cukup parah.

Adapun pembangunan jalan tol yang tepat pada waktunya adalah pembangunan jalan tol ke arah Jawa Timur. Pada saat itu, dia menuturkan, waktu tempuh kendaraan dari Solo menuju Kertosono yang berjarak 185 kilometer sudah sering di atas 5 jam.

“Nah, pada waktu-waktu tertentu sekarang ini waktu tempuh antara Yogyakarta dan Solo pun sudah sangat macet, mengingat sepanjang tahun kedua kota tersebut memang sudah tradisi sejak dahulu selalu menjadi *icon* pariwisata Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan, jumlah perjalanan atau ritase dan volume barang yang diangkut oleh pengusaha truk akan mengalami peningkatan ketika tol Solo-Yogyakarta dan Bawen-Yogyakarta telah terbangun, karena arus distribusi barang akan semakin cepat.

Saat ini, lanjutnya, Yogyakarta memiliki peran penting bagi salah satu produsen susu yang banyak beredar di dalam negeri.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pegunungan di Wonosari, Gunungkidul,

Jawa Tengah juga menjadi tempat bagi pemasok nasional terkait dengan *calcium calcite*. Adapun banyak kerajinan tangan di Yogyakarta yang diekspor ke luar negeri.

“[Di Yogyakarta] Selain banyak barang kerajinan ekspor, juga bahan mentah untuk berbagai macam industri,” katanya.

Saat ini asosiasi belum melakukan survei terkait dengan dampak tol Solo – Yogyakarta dan Bawen – Yogyakarta terhadap kinerja pelaku usaha truk, termasuk terkait dengan tarif tol yang harus berlaku dan sebagainya.

Dia menuturkan manfaat dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha truk masih seimbang terkait dengan tarif jalan tol yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, jika ada pengurangan atau diskon tarif jalan tol maka benefit yang dinikmati pelaku usaha truk sebesar pengurangan tersebut.

Pada perkembangan lain, jalan Tol Trans-Sumatra ruas Terbanggi Besar di Lampung hingga Kayu Agung di Sumatra Selatan dipastikan operasional pada Agustus 2019.

Project Manager PT Utama Karya (Persero), Hasan Turcahyo, mengatakan jalan tol sepanjang 185 kilometer itu rencananya akan diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2019.

“Progress sekarang sudah selesai kan jalannya, tinggal melakukan beberapa penyempurnaan saja, sehingga Agustus nanti bisa resmi beroperasi,” katanya saat dihubungi *Bisnis*, Senin (24/6).

Hasan memaparkan penyempurnaan yang sedang dikebut perseroan antara lain pemasangan pembatasan jalan (*gate rail*), rambu-rambu dan marka jalan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga sedang menyelesaikan pembangunan tempat istirahat (*rest area*) di sepanjang jalan tol tersebut meskipun Hasan belum bisa memastikan bangunan tersebut nantinya permanen atau masih bersifat sementara.

“Nanti ke depan permanen, kalau belum sempurna, ya sembari jalan diselesaikan [*rest area*],” kata Hasan.

(Yudi Supriyanto/Dinda Wulandari)

Judul	<b>Rencana Zonasi Diminta Beres Tahun Ini</b>	Tanggal	Selasa, 25 Juni 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)		
Resume	Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta agar seluruh pemerintah provinsi bisa merampungkan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) tahun ini.		

## ► PENGATURAN WILAYAH PESISIR

# Rencana Zonasi Diminta Beres Tahun Ini

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta agar seluruh pemerintah provinsi bisa merampungkan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) tahun ini.

Seperti diketahui, hingga saat ini, baru 21 provinsi dari total 34 provinsi yang telah menyelesaikan aturan terkait RZWP3K. Adapun sisanya, masih belum merampungkan aturan daerah yang merupakan mandate dari Undang-Undang No.27/2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyebutkan, penyusunan RZWP3K ini menjadi penting sebagai landasan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan bagi investasi atau pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Itu harus selesai dong, kalau ngak mekanismenya pakai apa," tegasnya, Senin (24/6).

Dengan adanya aturan ini, tiap-tiap daerah akan memiliki landasan hukum dalam memetakan dan memanfaatkan ruang laut yang ada sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan serta sumber daya yang dimiliki.

Pemetaan dan pemanfaatan ini termasuk untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. Namun, hal ini

pula yang menjadi salah satu penyebab lamanya proses penyusunan oleh sejumlah daerah ditambah kurangnya komitmen.

"Ingat, RZWP3K itu dasar untuk pemberian izin lokasi, izin pengelolaan. Daerah mau dikembangkan ke mana, itu arahnya dari kepentingan kepentingan tersebut," tambahnya.

Selain mengatur rencana pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut, ke depannya, RZWP3K juga bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi izin-izin pemanfaatan wilayah ruang laut yang sudah terbit saat ini.

Dia mencontohkan, adanya kasus di Tanjung Balai Karimun pada 2018 di mana saat itu ada sertifikat atas tanah yang ternyata berlokasi di laut. Keberadaan sertifikat tersebut pun akhirnya dibahas dan akhirnya dicabut oleh Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang menerbitkan sertifikat.

Kendati demikian, keberadaan RZWP3K tak lantas mengekang pemanfaatan ruang laut serta potensi sumber daya yang ada di dalamnya. Menurut Brahmantya, perubahan lokasi atau peruntukan yang telah ditetapkan sesuai fungsinya masih bisa berubah selama ada riset yang mendukung.

Untuk diketahui, kendati menjadi mandat yang diemban oleh pemerintah daerah, penyusunan RZWP3K ini juga harus melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan keperluannya.

"Dengan kementerian ESDM kami su-

dah sepakat untuk wilayah kerja minyak kami sudah berikan penetapan lokasi antar kementerian. Apakah di satu titik nggak akan ada tambahan lagi wilayah kerja minyak misalkan, bisa saja nambah. Tergantung dari risetnya," paparnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Zulficar Mochtar menyebutkan kesemrawutan pemanfaatan laut yang terjadi dalam beberapa dekade lalu perlu segera diakhiri dengan penataan ruang laut nasional dan daerah secara komprehensif.

Menurutnya, tantangan pembangunan di pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini adalah bagaimana upaya penataan kembali pengalokasian ruang untuk kegiatan pembangunan agar tidak tumpang tindih dan tidak terjadi konflik kepentingan.

Selain itu, untuk menjadi baselien dan proses penyusunan rencana pembangunan menjadi lebih terintegrasi.

"Kejadian pencemaran minyak di Teluk Balikpapan tahun lalu karena pipa yang ditabrak dan kapal pesiar Caledonia Sky yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat menjadi contoh betapa pemanfaatan laut belum terkoordinasi dengan baik dan tumpang tindih oleh sektor pembangunan," kata Zulficar.

Oleh karena itu, pengaturan rencana zonasi laut dalam satu dokumen perencanaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjadi arahan pembangunan sekaligus mitigasi konflik dan bencana. *(Juli E.R.Manalu)*